

Geopolitik dan geostrategi Indonesia dalam menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan

Indri Fernida

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 250503110096@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Geopolitik, geostrategi, kedaulatan, wilayah perbatasan, Indonesia

Keywords:

Geopolitics, geostrategy, sovereignty, border areas, Indonesia

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki posisi geopolitik yang strategis sekaligus menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga kedaulatan wilayah, khususnya di kawasan perbatasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran geopolitik dan geostrategi Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah perbatasan serta mengidentifikasi tantangan dan upaya strategis yang dilakukan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dari berbagai sumber jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa geopolitik Indonesia yang berlandaskan Wawasan Nusantara menjadi dasar dalam menjaga integritas

wilayah, sedangkan geostrategi diwujudkan melalui pendekatan multidimensional yang mencakup aspek pertahanan, pembangunan, dan diplomasi. Selain itu, wilayah perbatasan menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat tradisional seperti sengketa wilayah maupun non-tradisional seperti kejahatan lintas negara dan keterbatasan pembangunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan wilayah perbatasan tidak hanya memerlukan pendekatan keamanan, tetapi juga pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi terpadu yang melibatkan penguatan pertahanan, peningkatan infrastruktur, kerja sama internasional, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan demikian, geopolitik dan geostrategi memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan secara optimal dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Indonesia, as an archipelagic country, holds a strategic geopolitical position while simultaneously facing various challenges in maintaining its territorial sovereignty, particularly in border areas. This study aims to analyze the role of Indonesia's geopolitics and geostrategy in maintaining its sovereignty in border areas and identify the challenges and strategic efforts undertaken. The method used is a qualitative approach with a literature review from various scientific journal sources. The results show that Indonesia's geopolitics, based on the Archipelago Insight, is the basis for maintaining territorial integrity, while geostrategy is realized through a multidimensional approach encompassing aspects of defense, development, and diplomacy. Furthermore, border areas face various challenges, both traditional such as territorial disputes and non-traditional such as transnational crime and development limitations. These conditions indicate that managing border areas requires not only a security approach but also sustainable economic and social development. Therefore, an integrated strategy is needed that involves strengthening defense, improving infrastructure, international cooperation, and empowering local communities. Thus, geopolitics and geostrategy play a crucial role in optimally and sustainably maintaining Indonesia's sovereignty in border areas.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan telah memperoleh pengakuan internasional melalui United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 yang kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Pengakuan ini menegaskan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki kedaulatan atas wilayah perairannya secara sah di mata hukum internasional. Dalam perspektif geopolitik, hal ini memberikan landasan kuat bagi Indonesia untuk mengelola dan mempertahankan wilayahnya, termasuk di kawasan perbatasan. Dengan demikian, legitimasi internasional tersebut menjadi aspek penting dalam menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982, Indonesia memiliki total luas wilayah laut sekitar 5,9 juta km² yang terdiri dari 3,2 juta km² perairan teritorial dan 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif. Luas wilayah ini menunjukkan betapa strategis dan luasnya ruang maritim Indonesia yang harus dijaga dari berbagai ancaman, baik tradisional maupun non-tradisional. Dalam konteks geostrategi, pengelolaan wilayah laut yang luas ini menuntut adanya strategi terpadu antara pertahanan, keamanan, dan pembangunan. Oleh karena itu, penguatan pengawasan serta pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan (Abidin, 2018).

Selain aspek hukum internasional, faktor geografis juga berperan penting, Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai bencana alam skala besar, seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek keselamatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi stabilitas dan pengelolaan wilayah, khususnya di daerah perbatasan yang seringkali memiliki keterbatasan infrastruktur. Kerentanan tersebut dapat memperlemah pengawasan dan kontrol negara terhadap wilayah perbatasan, sehingga berpotensi menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan geopolitik dan geostrategi yang komprehensif untuk memastikan bahwa kedaulatan Indonesia tetap terjaga, terutama di wilayah perbatasan yang strategis dan rentan (Fu'adah et al., 2023).

Dalam konteks pengelolaan wilayah perbatasan, kecerdasan berperan penting bagi kelangsungan hidup manusia, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan dinamis. Kecerdasan yang dimiliki setiap individu pun beragam, sehingga dapat berkontribusi dalam berbagai bidang, termasuk dalam pengelolaan dan pengamanan wilayah negara. Dalam konteks geopolitik dan geostrategi Indonesia, keberagaman kecerdasan ini menjadi modal penting dalam merumuskan kebijakan serta strategi yang efektif untuk menjaga kedaulatan wilayah perbatasan (Mukti et al., 2020). Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya manusia yang cerdas dan adaptif menjadi faktor kunci dalam memperkuat pertahanan serta pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan terletak pada posisi strategis di antara dua samudra dan dua benua. Kondisi ini menjadikan Indonesia memiliki nilai geopolitik yang sangat penting dalam

percaturan global maupun regional. Namun, posisi strategis tersebut juga menghadirkan berbagai tantangan, terutama dalam menjaga kedaulatan wilayah perbatasan yang rentan terhadap berbagai ancaman (Gultom, 2024).

Wilayah perbatasan Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai batas administratif, tetapi juga sebagai representasi kedaulatan negara yang harus dijaga secara utuh. Dalam praktiknya, wilayah ini seringkali menghadapi berbagai persoalan seperti sengketa batas wilayah, aktivitas ilegal lintas negara, hingga keterbatasan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Zein, 2016).

Selain itu, dinamika global dan regional turut memperkuat kompleksitas permasalahan di wilayah perbatasan. Ancaman tidak lagi bersifat konvensional, tetapi juga meliputi ancaman non-tradisional seperti kejahatan transnasional, penyelundupan, dan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan wilayah perbatasan memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat militer, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, sosial, dan diplomasi (Iriansyah, 2018).

Dalam konteks tersebut, geopolitik dan geostrategi menjadi dua konsep penting yang digunakan Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya. Geopolitik memberikan kerangka pemahaman tentang hubungan antara ruang dan kekuasaan, sedangkan geostrategi berperan sebagai implementasi strategi nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara.

Oleh karena itu, kajian mengenai geopolitik dan geostrategi Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah perbatasan menjadi penting untuk memahami bagaimana negara merespons berbagai tantangan tersebut secara komprehensif dan berkelanjutan.

Landasan Teoretis Geopolitik dan Geostrategi Indonesia

Untuk memahami kajian mengenai geopolitik dan geostrategi Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah perbatasan, diperlukan landasan teoritis yang kuat sebagai dasar analisis. Geopolitik merupakan studi mengenai hubungan antara faktor geografis dengan kekuatan politik suatu negara. Dalam konteks Indonesia, geopolitik diwujudkan melalui konsep Wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia terhadap wilayahnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Konsep ini menjadi landasan dalam menjaga keutuhan wilayah negara kepulauan yang tersebar luas dan memiliki keragaman geografis serta sosial budaya. Dengan demikian, geopolitik Indonesia tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga pada integrasi nasional.

Geostrategi merupakan implementasi praktis dari geopolitik yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan strategi nasional. Dalam konteks Indonesia, geostrategi dikenal dengan konsep Ketahanan Nasional, yaitu kondisi dinamis yang mencerminkan keuletan dan ketangguhan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman (Iriansyah, 2018). Geostrategi Indonesia mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan nasional untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan negara, termasuk dalam pengelolaan wilayah perbatasan yang menjadi titik rawan konflik dan ancaman.

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengatur wilayah dan rakyatnya tanpa intervensi pihak lain. Dalam konteks wilayah perbatasan, kedaulatan mencakup penguasaan wilayah darat, laut, dan udara yang harus dijaga secara hukum dan faktual (Gultom, 2024). Kedaulatan ini juga diperkuat melalui hukum internasional, seperti Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982), yang menjadi dasar pengakuan terhadap wilayah negara kepulauan seperti Indonesia.

Wilayah perbatasan merupakan kawasan strategis yang memiliki fungsi penting dalam menjaga kedaulatan negara. Namun, wilayah ini seringkali identik dengan keterbatasan infrastruktur, rendahnya kesejahteraan masyarakat, serta tingginya potensi konflik dan aktivitas ilegal (Izzudin et al., 2022). Selain itu, wilayah perbatasan juga menjadi ruang interaksi antara negara yang berpotensi menimbulkan perbedaan kepentingan geopolitik, sebagaimana terlihat dalam berbagai kasus sengketa batas wilayah (Kartini, 2024).

Pembahasan

Geopolitik Indonesia dalam Konteks Wilayah Perbatasan

Geopolitik Indonesia berlandaskan pada konsep Wawasan Nusantara yang menempatkan seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pandangan ini menegaskan bahwa wilayah daratan, lautan, dan udara merupakan bagian integral dari kedaulatan negara. Dalam konteks wilayah perbatasan, Wawasan Nusantara menjadi pijakan penting dalam menjaga integritas wilayah sekaligus memperkuat identitas nasional di tengah dinamika global dan regional. Melalui cara pandang tersebut, Indonesia berupaya mempertahankan keutuhan wilayahnya secara menyeluruh dengan menempatkan persatuan nasional sebagai prioritas utama. Sejalan dengan itu, (Faslah, 2024) menjelaskan bahwa geopolitik dan geostrategi Indonesia berperan penting dalam membangun keberlanjutan negara serta menjaga kedaulatan nasional melalui penguatan identitas kebangsaan dan pengelolaan wilayah yang terpadu.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan geopolitik yang kompleks, termasuk sengketa wilayah dengan negara tetangga. Tantangan ini muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara negara yang berbatasan langsung. Misalnya, kasus sengketa Ambalat menunjukkan bahwa faktor ekonomi, politik domestik, dan hukum internasional menjadi bagian penting dalam dinamika geopolitik Indonesia (Prihatna, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa konflik wilayah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor geografis, tetapi juga oleh kepentingan strategis masing-masing negara.

Selain itu, perbedaan visi geopolitik antar negara juga dapat memperpanjang konflik perbatasan. Setiap negara memiliki kepentingan dan cara pandang yang berbeda terhadap wilayahnya. Kondisi ini dapat memicu ketegangan apabila tidak dikelola dengan baik. Hal tersebut terlihat dalam sengketa antara Indonesia dan Timor Leste di wilayah Naktuka (Kartini, 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa geopolitik Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai konsep, tetapi juga sebagai alat analisis dalam memahami dan mengelola konflik wilayah

perbatasan. Geopolitik membantu pemerintah dalam melihat masalah secara lebih luas dan terarah. Dengan pendekatan ini, kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, geopolitik menjadi penting dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan wilayah negara.

Geostrategi Indonesia dalam Menjaga Kedaulatan

Dalam implementasinya, geostrategi Indonesia mengedepankan pendekatan multidimensional yang mencakup aspek pertahanan, pembangunan, dan diplomasi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengelolaan wilayah perbatasan tidak hanya berfokus pada keamanan saja. Setiap aspek saling mendukung untuk menciptakan kondisi yang stabil dan berkelanjutan. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara keamanan dan kesejahteraan di wilayah perbatasan.

Namun, kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan di Indonesia masih cenderung berorientasi pada pendekatan keamanan dibandingkan kesejahteraan masyarakat (Zein, 2016). Hal ini terlihat dari fokus yang lebih besar pada pengamanan dibandingkan pembangunan ekonomi dan sosial. Kondisi tersebut dapat menyebabkan ketimpangan dan kurangnya perhatian terhadap masyarakat perbatasan. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara pendekatan keamanan dan pembangunan agar wilayah perbatasan tidak hanya menjadi “halaman belakang”, tetapi juga “beranda depan” negara.

Selain itu, penguatan infrastruktur, teknologi geospasial, serta kerja sama antar lembaga menjadi bagian penting dalam geostrategi Indonesia untuk meningkatkan pengawasan dan pengelolaan wilayah perbatasan (Gultom, 2024). Infrastruktur yang memadai akan mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Teknologi geospasial membantu dalam pemantauan wilayah secara lebih akurat dan efektif. Kerja sama antar lembaga juga diperlukan agar kebijakan dapat berjalan secara terpadu dan maksimal.

Tantangan dalam Menjaga Wilayah Perbatasan

Wilayah perbatasan Indonesia menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional. Tantangan ini muncul karena wilayah perbatasan merupakan titik pertemuan dengan negara lain. Tantangan tradisional meliputi sengketa batas wilayah dan konflik teritorial yang dapat memicu ketegangan antar negara. Sementara itu, tantangan non-tradisional mencakup kejahatan lintas negara, penyelundupan, dan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal.

Selain itu, keterbatasan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan juga menjadi faktor yang dapat melemahkan kedaulatan negara. Infrastruktur yang kurang memadai membuat akses dan pengawasan menjadi terbatas. Kondisi ini menyebabkan wilayah perbatasan rentan terhadap pengaruh negara lain dan aktivitas ilegal (Izzudin et al., 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa masalah internal juga berpengaruh besar terhadap keamanan wilayah.

Dengan demikian, tantangan di wilayah perbatasan tidak hanya bersifat eksternal, tetapi juga internal. Kedua jenis tantangan ini saling berkaitan dan dapat memperburuk kondisi wilayah jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan perhatian

yang serius dari pemerintah dalam mengelola wilayah perbatasan. Pendekatan yang komprehensif menjadi penting agar kedaulatan negara tetap terjaga secara optimal.

Upaya dan Solusi Strategis

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Indonesia perlu menerapkan strategi yang terintegrasi antara aspek keamanan, pembangunan, dan diplomasi. Ketiga aspek ini harus berjalan secara seimbang agar hasilnya lebih optimal. Pendekatan yang terpadu akan membantu pemerintah dalam mengelola wilayah perbatasan secara menyeluruh. Dengan strategi ini, diharapkan kedaulatan negara dapat tetap terjaga dengan baik.

Pertama, penguatan pertahanan dan keamanan melalui peningkatan kapasitas aparat serta penggunaan teknologi modern dalam pengawasan wilayah perbatasan. Aparat keamanan perlu dibekali dengan kemampuan dan pelatihan yang memadai. Teknologi modern juga sangat membantu dalam memantau wilayah yang luas dan sulit dijangkau. Dengan demikian, pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Kedua, pembangunan ekonomi dan infrastruktur di wilayah perbatasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan pembangunan. Infrastruktur yang baik akan memudahkan akses transportasi dan distribusi barang. Peningkatan ekonomi masyarakat juga dapat mengurangi ketergantungan pada aktivitas ilegal. Hal ini penting untuk menciptakan stabilitas di wilayah perbatasan.

Ketiga, peningkatan diplomasi dan kerja sama internasional dalam menyelesaikan sengketa wilayah secara damai dan sesuai dengan hukum internasional. Diplomasi menjadi cara penting untuk menghindari konflik terbuka antar negara. Kerja sama internasional juga dapat memperkuat hubungan antar negara yang berbatasan. Dengan cara ini, penyelesaian masalah dapat dilakukan secara lebih damai dan terarah.

Keempat, penguatan peran masyarakat lokal sebagai bagian dari sistem pertahanan negara, sehingga tercipta sinergi antara negara dan masyarakat dalam menjaga kedaulatan wilayah (Gultom, 2024). Masyarakat lokal memiliki peran penting karena mereka berada langsung di wilayah perbatasan. Keterlibatan mereka dapat membantu dalam pengawasan dan menjaga keamanan lingkungan. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, kedaulatan wilayah dapat dijaga secara lebih kuat.

Kesimpulan dan saran

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki posisi geopolitik yang sangat strategis dalam konteks global dan regional. Posisi ini memberikan keuntungan sekaligus tantangan dalam menjaga kedaulatan wilayah, terutama di kawasan perbatasan. Wilayah perbatasan menjadi titik penting yang mencerminkan eksistensi negara di hadapan negara lain. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah perbatasan harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan.

Geopolitik Indonesia yang berlandaskan Wawasan Nusantara menempatkan seluruh wilayah sebagai satu kesatuan utuh. Konsep ini menjadi dasar dalam menjaga integritas wilayah dan memperkuat identitas nasional. Dalam konteks wilayah

perbatasan, geopolitik berfungsi sebagai pedoman dalam memahami berbagai dinamika yang terjadi. Dengan demikian, geopolitik memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan negara.

Selain itu, geostrategi Indonesia menunjukkan pendekatan yang bersifat multidimensional. Pendekatan ini mencakup aspek pertahanan, pembangunan, dan diplomasi yang saling berkaitan. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan wilayah perbatasan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketidakseimbangan antara pendekatan keamanan dan kesejahteraan. Kebijakan yang lebih berfokus pada keamanan seringkali mengabaikan aspek pembangunan masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan dan kerentanan di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, diperlukan integrasi kebijakan yang lebih seimbang.

Tantangan di wilayah perbatasan tidak hanya berasal dari faktor eksternal, tetapi juga faktor internal. Ancaman eksternal meliputi sengketa wilayah dan kejahatan lintas negara. Sementara itu, faktor internal seperti keterbatasan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat juga menjadi permasalahan serius. Kedua faktor ini saling berkaitan dan memerlukan penanganan yang komprehensif.

Upaya strategis yang dilakukan Indonesia harus mencakup berbagai aspek secara terpadu. Penguatan pertahanan dan keamanan menjadi langkah penting dalam menjaga kedaulatan wilayah. Selain itu, pembangunan ekonomi dan infrastruktur juga harus menjadi prioritas. Dengan demikian, wilayah perbatasan dapat berkembang secara optimal.

Diplomasi dan kerja sama internasional juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas wilayah perbatasan. Melalui diplomasi, konflik dapat diselesaikan secara damai sesuai hukum internasional. Kerja sama antar negara juga dapat memperkuat hubungan bilateral. Hal ini penting untuk menciptakan keamanan kawasan yang berkelanjutan.

Peran masyarakat lokal juga tidak dapat diabaikan dalam menjaga kedaulatan wilayah. Masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan merupakan garda terdepan dalam menjaga keamanan. Keterlibatan mereka dapat membantu pemerintah dalam pengawasan wilayah. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang sangat penting.

Berdasarkan pembahasan tersebut, pemerintah perlu meningkatkan kebijakan yang terintegrasi dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Kebijakan tersebut harus mencakup aspek keamanan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perlu adanya peningkatan koordinasi antar lembaga terkait. Dengan langkah ini, pengelolaan wilayah perbatasan dapat berjalan lebih efektif.

Sebagai saran, pemerintah diharapkan dapat memperkuat pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga perlu menjadi perhatian utama. Penggunaan teknologi modern dalam

pengawasan wilayah juga harus ditingkatkan. Dengan demikian, kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan dapat terjaga secara optimal dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abidin, M. Z. (2018). Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut untuk Memenuhi Kebutuhan Perekonomian Masyarakat Asli Papua dalam Kajian Maqasid Syariah. *Journal of Economics and Business Sharia*, 1(1), 45–54. <https://repository.uin-malang.ac.id/5718/>
- Faslah, R. (2024). Identitas Nasional, Geostrategi, dan Geopolitik: Membangun Keberlanjutan dan Kedaulatan. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <http://repository.uin-malang.ac.id/20872>
- Fu'adah, A. F., Almais, A. T. W., & Syauqi, A. (2023). Klasifikasi Tingkat Kerusakan Sektor Pasca Bencana Alam Menggunakan Metode MULTIMOORA Berbasis Web. *JISKA (Jurnal Informatika Sunan Kalijaga)*, 8(3), 222–230. <https://doi.org/10.14421/jiska.2023.8.3.222-230>
- Gultom, M. F. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Strategi Geopolitik di Indonesia Sebagai Negara Kepulauan dalam Menghadapi Tentang Sengketa Wilayah Perbatasan. *Adil Indonesia Jurnal*, 5(2), 136–145. <https://doi.org/10.35473/aij.v5i2.3672>
- Iriansyah, H. S. (2018). Manajemen Strategi Pengamanan Wilayah Nasional Dalam Prespektif Geopolitik Dan Geostrategi Perbatasan NKRI. *Jurnal Ilmu Pendidikan STKIP Kusuma Negara*, 9(2).
- Izzudin, M., Aris Marfai, Andri Kurniawan, Agung S. Nugroho, & Isnaini Sadali. (2022). Identifikasi Potensi Investasi Wilayah Perbatasan Indonesia. *Media Komunikasi Geografi*, 23(2), 141–157. <https://doi.org/10.23887/mkg.v23i2.33941>
- Kartini, I. (2024). Perbedaan Visi Geopolitik Perbatasan Darat Indonesia dan Timor Leste di Segmen Naktuka (Noel Besi-Citrana) (2019-2022). *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 50(2), 317–328. <https://doi.org/10.55981/jmi.2024.8846>
- Mukti, T. S., Utami, M. A. P., & Puspitasari, F. F. (2020). Sekolah Alam: Evaluasi Program Sekolah dalam Menumbuhkan Kecerdasan Naturalistik dan Kinestetik Pada Pendidikan Anak Usia Dini. *INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 25(1), 123–132. <https://repository.uin-malang.ac.id/6362/>
- Prihatna, N. N. (2025). Geopolitik Perbatasan Indonesia–Malaysia: Studi Kasus Konflik Ambalat. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4), 366–370. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17529521>
- Zein, Y. A. (2016). Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(1), 97–122. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art6>